

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BELANJA
PENDIDIKAN
(Studi Kasus: 12 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun
2012)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Pratama Arief Widodo
105020100111018**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BELANJA PENDIDIKAN

(Studi Kasus: 12 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012)

Yang disusun oleh :

Nama : Pratama Arief Widodo

Nim : 105020100111018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel jurnal tersebut dibuat sebagai persyaratan ujian skripsi yang dipertahankan di depan Dewan Penguji tanggal 12 Maret 2014.



Malang, 27 Maret 2014

Dosen Pembimbing

Dr. Moh. Khusaini, SE.,M.Si.,MA.

NIP. 19710111 199802 1 001

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BELANJA PENDIDIKAN (Studi Kasus: 12 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012)

Pratama Arief Widodo

Moh. Khusaini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: pratamaariefwidodo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efisiensi dan efektivitas dari belanja pendidikan di 12 daerah di Jawa Timur yang termasuk dalam 6 daerah belanja pendidikan tertinggi dan terendah pada tahun 2012. Alat analisis yang digunakan untuk melihat efisiensi adalah (DEA) *Data Envelopment Analysis* yaitu *analysis frontier* yang mengacu pada efisiensi teknis, variabel yang digunakan adalah (belanja pendidikan) sebagai *input* dan (jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA serta jumlah guru SD, SMP, dan SMA) sebagai *output*. Sedangkan untuk melihat efektivitas dari belanja pendidikan adalah dengan melihat APS (Angka Partisipasi Sekolah) sebagai *outcomes* dari belanja pendidikan. Hasil ini menunjukkan bahwa yang mendapatkan nilai efisien dan efektif hanya 3 daerah yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan kota Surabaya. Daerah lainnya yang belum efisien dan efektif cenderung mengalami pemborosan belanja pendidikan yang terlalu tinggi namun *output* yang ada masih belum optimum serta penyerapan penduduk usia sekolah juga masih rendah.

Kata kunci: Efisiensi, Efektivitas, Belanja Pendidikan, Jumlah Sekolah, Jumlah Guru, *Data Envelopment Analysis*, Angka Partisipasi Sekolah, *Input*, *Output*, *Outcomes*

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi yang baik saat ini tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat atau yang bersifat ekonomi lainnya tetapi perhatian khusus terhadap hal non-ekonomi atau bersifat sosial juga perlu ditingkatkan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi yang bersifat non-ekonomi lebih tepatnya pengembangan dalam hal sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi yang bersifat "*human investment*", investasi ini tidak akan tampak dalam jangka pendek atau tidak dapat dilihat pengaruhnya kedalam perekonomian karena aktivitas ini bukan dalam hal ekonomi. Perekonomian yang baik dapat dilihat dari tingginya PDRB. Seperti halnya di Jawa Timur dapat digambarkan dalam penetapan belanja daerah di masing-masing Kabupaten dan Kota karena belanja merupakan pemenuh kebutuhan, Investasi ekonomi serta sebagai tujuan pemerintah sehingga dapat memberikan pendapatan daerah yang tinggi akibat investasi yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang berlaku di wilayah Jawa Timur. Salah satu kebijakan yang dijalankan pemerintah adalah dalam investasi hal pendidikan. Investasi ini berupa belanja pendidikan yang nantinya dapat menghasilkan *output* serta *outcomes* yang dapat dirasakan masyarakat.

Belanja pendidikan yang besar untuk perkembangan kualitas pendidikan yang besar memiliki sumber dana dari pajak pemerintah yang dipungut dari masyarakat, maka akan semakin tinggi pula pajak yang dikenakan. Keadaan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam segi perekonomian sudah sangat baik, perkembangan ekonomi yang sangat baik memberikan

kontribusi pada penerimaan pajak yang akhirnya terjadi peningkatan pengeluaran pada belanja pendidikan

Belanja pendidikan yang diambil dari APBD sudah terlaksana sejak perubahan peraturan sentralisasi menjadi desentralisasi. Tentunya melalui proses yang sangat panjang sehingga menghasilkan kebijakan seperti saat ini. Kelebihan dari desentralisasi adalah dapat meningkatkan kinerja pemerintah serta tanggung jawab pada pemerintah daerah agar lebih mudah dalam pengawasan. Selain itu, desentralisasi juga menjadi peranan penting dalam penyelenggaraan layanan dasar, kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengelola belanja pendidikan ditingkat sekolah dasar hingga menengah sangat besar. Pada tahun 2009 tercatat persentase belanja pendidikan untuk sekolah dasar sebesar 71, sekolah menengah pertama 61 dan sekolah menengah atas sebesar 53 (World Bank, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan untuk pemerintah daerah dalam hal desentralisasi cukup besar sehingga tanggung jawab penuh berada pada pemerintah daerah. Tetapi untuk saat ini anggaran sebesar ini masih cukup untuk melaksanakan program pemerintah yang terfokus pada sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Karena pemerintah lebih mengutamakan kualitas pendidikan dan tingkat pendidikan yang lebih baik serta lebih mendapatkan tercapainya tujuan pemerintah. Namun saat ini khususnya di Jawa Timur pada Pembagian belanja pendidikan jauh lebih tinggi dari peraturan pemerintah nasional yang menentukan minimal 20 untuk anggaran pendidikan. Penggunaannya juga semakin banyak. Namun biaya pendidikan untuk beberapa waktu lalu masih mencerminkan biaya pendidikan yang sangat mahal. Banyaknya putus sekolah hanya karena keterbatasan dalam hal biaya pendidikan tinggi membuat belanja pendidikan yang tinggi terlihat tidak memiliki arti apapun.

Namun anggaran untuk belanja pendidikan yang sangat besar ini belum dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari kebijakan kesesuaian atau mencapai sasaran, dan transparansi pada birokrasi maupun proses pemberian dana belum sampai yang paling akhir. Hal ini sesuai dengan definisi ilmu ekonomi menurut Sadono Sukirno yang menyebutkan bahwa “ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber-sumber daya” (Laily, 2013:2). Hal ini perlu dilakukan analisis ekonomi yang dapat membantu tercapainya tingkat keberhasilan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur agar belanja pendidikan yang tergolong sangat besar ini berguna semaksimal mungkin dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta meminimalkan pemborosan dana karena dapat terjadi ketidaktepatan sasaran. Analisis DEA (*Data Envelopment Analysis*) menjadi alat dalam mengukur efisiensi melalui pendekatan *Input-Output*. Kegunaan alat analisis DEA terhadap penelitian efisiensi belanja pendidikan adalah dapat mengetahui bagaimana sebaiknya belanja pendidikan digunakan sebaik mungkin dengan menyediakan pelayanan pendidikan berupa ketersediaan jumlah sekolah dan ketersediaan akan guru pengajar hingga daya tampung berupa murid dapat dilakukan dengan melihat daerah mana yang dapat melakukannya dengan paling efisien sehingga dijadikan panutan bagi daerah lainnya. Cara kerja pendekatan ini dengan memaksimalkan *Output* tanpa menambahkan *Input* dan melakukan penghematan pada *Input* dengan tidak mengurangi *Output* (Hadinata dan Manurung, 2008: 2). Kelebihan penggunaan alat analisa ini dibandingkan alat lain adalah pemilihan data lebih fleksibel, yang tidak membutuhkan asumsi hubungan fungsional antara variabel *Input* dan *Output*, dapat digunakan untuk menilai efisiensi, kualitas, efektivitas dan kombinasinya, memiliki satuan ukuran dari *Input* dan *Output* DEA dapat berbeda-beda serta tidak memerlukan sebuah asumsi bentuk fungsional untuk menghubungkan *Input* dengan *Output* dan dapat memberikan peringkat efisiensi berdasarkan data numerik dan tidak menggunakan opini subyektif dari seseorang. Selain itu banyaknya daerah pinggiran yang sulit dijangkau oleh pemerintah membuat banyaknya ketimpangan yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Ketimpangan yang terjadi dapat dilihat melalui penyerapan penduduk usia 7–19 tahun yang bersekolah sehingga dapat diketahui daerah mana yang mampu menyediakan fasilitas pendidikan dengan sangat baik sehingga menghasilkan daya serap yang tinggi. Hal ini ditunjukkan bahwa efektivitas dari belanja pendidikan juga masih sangat kurang. Analisis efektivitas ini sangat penting karena akan dapat menggambarkan atau menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah terealisasi kepada masyarakat atau belum. Seperti yang dijelaskan (Drucker, 2001, p.147 dalam Mihaiu, Opreana, dan Cristescu, 2010: 5). Pendapat Drucker menjelaskan bahwa tidak ada efisiensi tanpa efektivitas, karena lebih penting untuk melakukannya dengan baik apa yang telah diusulkan (efektivitas) daripada melakukan sesuatu dengan baik tetapi belum tentu sesuai dengan yang ingin dicapai pemerintah. Maka peneliti menggunakan analisis rasio angka partisipasi sekolah sebagai alat untuk melihat efektivitas, cara

kerja dari pendekatan ini adalah menghitung jumlah penduduk yang bersekolah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk usia sekolah.

B. KERANGKA TEORITIS

Pendidikan Nasional

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 menyebutkan “Pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.” Arti diatas menjelaskan bahwa dalam kaitannya pelaku didik mengikuti proses belajar yang sesuai dibutuhkan untuk dirinya sendiri maupun ketika mereka terjun ke masyarakat, agar tercapai masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan di Indonesia sampai tahun ajaran 2013 menggunakan kurikulum berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.” Hal tersebut dapat di simpulkan bahwa pendidikan di Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai ketuhanan, memegang teguh jati diri bangsa, dan terus berkompetitif dengan keadaan yang semakin maju. Dalam menjalankan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 maka dibuatkan sistem pendidikan. “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.” Disebutkan bahwa pendidikan saling terkait secara terpadu merupakan tingkatan pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi yang dilaksanakan secara bertahap. Dan pada poin kedua peserta didik berpendidikan sesuai dengan proses yang selaras agar terus berkembang potensi yang dimilikinya.

Seperti di jelaskan oleh Fattah (2012) bahwa dasar pemikiran dalam pemasaran pendidikan dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, memasarkan akademik dalam perdagangan dunia dengan cara melibatkan institusi. Kedua, menerapkan prinsip bisnis dalam pengelolaannya untuk restrukturisasi institusi pendidikan. Gagasan ini menggambarkan perbaikan terfokus pada “*inside-out* dan *outside -in*” seperti yang disebutkan oleh (Buchbinder dan Newson, 1990 dalam Fattah, 2012: 156).

Teori Pengeluaran Negara atau Daerah

Fungsi utama pemerintah pada hakekatnya adalah melaksanakan fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Untuk pemerintah pusat lebih fokus dalam melaksanakan fungsi distribusi dan stabilisasi karena sifatnya yang mengatur dan lebih bersifat umum. Sedangkan pemerintah daerah lebih kepada fungsi alokasi karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi daerah setempat. Menurut Prawoto (2011:54) tentang fungsi alokasi merupakan fungsi yang menyediakan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik serta penetapan komposisi barang publik di terapkan. Pelaksanaan harus dilakukan dengan baik melalui koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi di tiap tingkatan pemerintah.

Seperti pada penjelasan di teori Musgrave dan Rostow mengenai teori pengeluaran Negara “Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.” (Prasetya, 2012)

Teori Musgrave dan Rostow mendukung pengeluaran pemerintah yang besar untuk digunakan sebagai investasi yang memperlancar kegiatan ekonomi seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Selain itu pemerintah juga menyediakan pasar bagi swasta untuk turut campur dalam pembangunan sesuai dengan tujuan pemerintah namun swasta hanya difasilitasi dalam hal memperlancar proses kebijakan. Pemikiran pemerintah yang harus tetap sejalan adalah investasi melalui pengeluaran pemerintah sangat diperhatikan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan, Musgrave berpendapat rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar tetapi rasio antara investasi pemerintah dan pendapatan nasional semakin kecil. Rostow juga berpendapat bahwa pada tahap ini pembangunan ekonomi mengalami peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan. Teori Musgrave dan Rostow merupakan pandangan yang timbul dari pengamatan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak Negara. Tetapi teori ini tidak menjelaskan bagaimana tahap pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terjadi melalui tahapan atau beberapa tahap dapat terjadi secara bersamaan.

Pengeluaran belanja pemerintah sangat penting penggunaannya untuk menjalankan kebijakan dari pemerintah yang memiliki fungsi untuk diterapkan di masyarakat. Selain itu telah dijelaskan di *wealth of nations*, dalam buku pengantar keuangan publik (Prawoto, 2011: 55). pada fungsi tiga dan empat dari empat fungsi mengenai peran pemerintah yang disebutkan Adam Smith yaitu “membentuk dan memelihara instansi pelayanan publik agar memberi manfaat yang optimal dengan menetapkan standar pelayanan minimal sebagaimana dituntut oleh undang-undang pelayanan publik” dan “memenuhi anggaran belanja yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan perundangan guna menjalankan tugas pemerintah yang efisien dan efektif”.

Teori Peacock dan Wiseman “masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Dalam hal ini pandangan mengenai pengeluaran pemerintah berasal dari pajak penerimaan, sehingga jika pemerintah menaikkan pengeluaran akan berdampak pada kenaikan masyarakat membayar pajak dan masyarakat tidak akan setuju jika pajak dinaikkan tanpa alasan yang jelas.

Pengeluaran daerah harus mendasarkan konsep *value for money* yang telah dijelaskan oleh (Mardiasmo dalam Lestari, 2013), yaitu:

a. Ekonomi

Merupakan hubungan antara pasar (nilai uang) dan masukan (*Input*). Ekonomi adalah praktek pengembalian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang memungkinkan. Pengertian ekonomi dalam hal ini sebaiknya juga berarti pengeluaran daerah yang cermat dan penggunaan keuangan daerah secara optimal tanpa pemborosan (tepat guna).

b. Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara *Output* yang dihasilkan terhadap *Input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan dilakukan secara efisien apabila suatu target kinerja tertentu (*Outcome*) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya serendah-rendahnya.

c. Efektivitas

Merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Efektivitas dalam pemerintah dapat diartikan sebagai penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia

Efisiensi Pengeluaran Negara

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah efisiensi penyaluran belanja pendidikan di tingkat dasar sampai menengah atas di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Analisis ini penggunaannya berupa perbandingan belanja pendidikan yang digunakan di tiap daerahnya

masing-masing, tetapi untuk menganalisis sebuah kinerja pemerintahan yang bersifat sosial maka akan didapat efisiensi ekonomi investasi bernilai nol. Karena pengukuran kinerja pemerintah akan sulit dilakukan dalam bentuk uang sebagai indikator manfaat, melainkan pencapaian kebijakan yang lebih bersifat kesejahteraan/kualitas diri masyarakat (sumber daya manusia). Tidak keluar dari fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat berupa kebutuhan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Perlunya pemerintah dalam menghitung pelaksanaan kebijakan dengan memperhatikan efisiensi kinerja belanja pendidikan yang akan diperlukan juga untuk mencapai efektivitas. Kinerja dapat didefinisikan sebagai kombinasi yang memadai antara efisiensi dan efektivitas. Efisiensi umumnya merujuk pada penggunaan minimum sejumlah *Input* tertentu guna menghasilkan sejumlah *Output* tertentu (Wulansari, 2010). *Input* dan *Output* tertentu dalam hal ini dimaksudkan bahwa cara dalam pengelolaan dan target yang ingin di capai sesuai dengan yang di inginkan, kombinasi yang baik untuk mencapai efisiensi adalah dengan mendapatkan pencapaian hasil (*Output*) yang optimum dengan mengatur masukan (*Input*) seminimal mungkin.

Peter Drucker berpendapat “*is no efficiency without effectiveness, because it is more important to do well what you have proposed (the effectiveness) than do well something else that was not necessarily concerned*” (Drucker, 2001, p.147 dalam Mihaiu, Opreana, dan Cristescu, 2010: 5). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada efisiensi tanpa efektivitas, karena lebih penting untuk melakukannya dengan baik apa yang telah diusulkan (efektivitas) daripada melakukan sesuatu dengan baik tetapi belum tentu sesuai dengan yang ingin dicapai pemerintah.

Dasar efisiensi adalah rasio/perbandingan *Output* terhadap *Input*. Cara untuk meningkatkan efisiensi antara lain dengan (Yasar A. Ozcan, 2008 dalam Wulansari, 2010) :

- a. Meningkatkan *Output*,
- b. Mengurangi *Input*,
- c. Atau jika kedua *Output* dan *Input* ditingkatkan, maka tingkat kenaikan untuk *Output* harus lebih besar daripada tingkat kenaikan untuk *Input* atau,
- d. Jika kedua *Output* dan *Input* diturunkan, laju penurunan untuk *Output* harus lebih rendah daripada tingkat penurunan untuk *Input*.

Definisi diatas menjelaskan bahwa untuk mencapai target harus disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Efisiensi yang digunakan pada sebuah sistem ekonomi akan dapat menghasilkan lebih banyak hasil keluaran (*Output*) dengan mengatur *Input* agar tidak terjadi penambahan. Dalam ekonomi, kegiatan pasar secara umum dianggap lebih efisien dibandingkan dengan kegiatan lainnya meskipun dengan dasar memberikan kesejahteraan. Anggapan ini akan berlaku hanya jika pasar terjadi pada keseimbangan sempurna Sedangkan pada ketidak sempurnaan pasar maka akan berlaku kegiatan yang hanya mengindahkan kesejahteraan melalui penyediaan barang, hal ini yang dapat dikatakan efisien. Efisiensi terdapat 3 konsep yang dikemukakan oleh (Ramens Bhat dalam wulansari, 2010), ketiga ketiga konsep ini adalah efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi biaya. Namun analisis penelitian ini lebih mengarah pada efisiensi teknis. (Ramens Bhat dalam wulansari, 2010) Pengertian dari efisiensi teknis adalah efisiensi yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja, modal, dan mesin sebagai *Input* untuk menghasilkan *Output* maksimum. Dengan menerapkan teknologi yang sama pada semua unit maka diharapkan tidak akan ada *Input* yang sia-sia dalam memproduksi kuantitas *Output* tertentu. Sebuah organisasi yang beroperasi lebih baik daripada semua organisasi lain yang disampel, maka bias dikatakan bahwa organisasi ini telah efisien secara teknis.

Ekonomi mikro dalam menilai sistem ekonomi dapat dilihat melalui efisiensi. Dalam mencapai efisiensi maka kita harus menggunakan sumber daya yang dimiliki agar dapat memberikan kesejahteraan yang maksimum. Kesejahteraan umum ini dijadikan konsep berupa efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi ini pertama kali dikembangkan oleh ekonom Italia, Vilfredo Pareto, di abad kesembilan belas. Sehingga efisiensi ini sering disebut efisiensi Pareto. (Case & Fair, 2006: 302) Definisi dari efisiensi Pareto adalah suatu kondisi dimana tidak mungkin terjadi perubahan yang akan membuat beberapa anggota masyarakat lebih beruntung, tanpa membuat anggota masyarakat lainnya merasa lebih merugi. Hal ini menjadi tugas bagi pembuat kebijakan ekonomi untuk menjadikan ekonomi lebih efisien kepada semua masyarakat. Sudut ekonomi mikro bertujuan untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan mengurangi ketidak seimbangan pasar atau biasa disebut distorsi ekonomi. Meskipun tidak ada teori yang

menjelaskan bahwa dengan mengurangi distorsi pasar maka akan terjadi peningkatan efisiensi ekonomi. Selanjutnya yang kedua berdasarkan dalil yang menyatakan bahwa jika ada beberapa distorsi pasar maka tidak dapat dihindari hanya dalam satu sektor saja yang akan bergerak ke arah yang lebih besar dalam kesempurnaan pasar terdapat sektor lain yang bisa menurunkan efisiensi. Dibawah merupakan rumus efisiensi

$$efisiensi = \frac{output}{input}$$

Keterangan dari rumus diatas, jika dengan hasil sama dengan satu atau lebih maka dapat dikatakan efisien dan hasilnya berada dibawah satu maka dapat dikatakan tidak efisien.

Efektivitas Dalam Pengeluaran Publik

Efektivitas merupakan ukuran yang tepat dalam melihat manfaat yang dinikmati masyarakat sesuai dengan *Input* yang dikeluarkan pemerintah. dalam efisiensi pemerintah akan lebih memilih cara yang benar dalam melakukan tugasnya. Namun dalam efektivitas pemerintah diharuskan melakukan sesuatu yang tepat. Jika efisiensi melihat hubungan antara *Input* dan *Output*, maka efektivitas melihat hubungan antara *Input* dan tujuan/sasaran/dampak. Cara mengetahui tercapainya efektivitas bias melalui tujuan umum pemerintah/kebijakan fiskal seperti kesejahteraan (pertumbuhan ekonomi), keadilan sosial (ekuitas), stabilisasi dan lain-lain, ataupun tujuan sektoral yang lebih spesifik misalnya kualitas kesehatan masyarakat, kuantitas dan kualitas pelayanan publik, kondisi infrastuktur, standar kesehatan, dan lain-lain.

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif non parametrik berupa *linier programming*. Karena data dikumpulkan berupa angka-angka untuk menghitung besaran tiap variabel yang digunakan. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini terletak di pendekatan *Input* dengan *Output*. Satuan variabel yang digunakan tidak sama untuk variabel *Input* satuan hitungnya menggunakan besaran rupiah mata uang dan variabel *Output* menggunakan satuan jumlah besaran hitung. Selain itu peneliti juga menggunakan rasio yang digunakan untuk melihat Efektivitas melalui *Outcome* dari variabel *Input*. Satuan hitung yang digunakan adalah persentase.

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena peneliti ingin mengetahui seberapa efisien belanja pendidikan terhadap jumlah guru dan fasilitas pendidikan di 12 daerah di Jawa Timur yang diteliti. Variabel ini menggunakan pengukuran atau persamaan uji DEA karena untuk melihat efisiensi dari pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja pendidikan sebagai *Input* terhadap keluaran berupa *Output*. Maka peneliti memilih menggunakan pendekatan ini sebagai bahan untuk menganalisis.

Peneliti juga melihat Efektivitas dan ketepatan anggaran yang diterapkan melalui belanja dari pemerintah di 12 daerah di Jawa Timur, maka peneliti memperkuat analisisnya menggunakan angka partisipasi sekolah yang dilihat pada tahun 2012 berfungsi untuk melihat kemampuan daya serap penduduk usia sekolah yang bersekolah. Kuantitatif deskriptif merupakan jenis penelitian ini karena setelah dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan perhitungan selanjutnya didapat hasil. Dengan hasil tersebut peneliti menggabungkan antara realita dan teori dengan menjabarkan hasil, sehingga diperoleh gap yang terjadi diantara teori dengan realita.

Uji DEA

Penelitian belanja pendidikan untuk melihat efisiensi terhadap *Input* dan *Output* yang telah dicapai pemerintah maka peneliti menggunakan metode "*data envelopment analysis*". Metode ini bersifat *linier programming* digunakan untuk mengoptimalkan model matematika

dengan cara mengukur efisiensi relatif dengan menghasilkan nilai tunggal efisiensi bagi setiap observasi. Nilai ini bisa digunakan untuk mengukur efisiensi teknis, skala efisiensi, dan efisiensi alokatif. DEA memiliki fungsi untuk menggambar batas efisiensi mewakili *Output* dan *Input* yang terbaik. Metode yang dipakai adalah dengan membandingkan suatu organisasi dengan organisasi sejenis yang maya. DEA merupakan model matematika yang relatif mudah dimana berbagai paket perangkat lunak yang tersedia mampu mengukur efisiensi secara relatif mudah.

Pada non parametrik yang dilakukan adalah mengkonstruksikan sebuah *production possibility set* dari *Input* dan *Output* unit-unit yang akan diobservasi. *Production possibility set* ini dibuat sehingga berisikan semua kemungkinan hubungan *Input-Output* secara prinsip, termasuk dari unit-unit yang dinilai. Dalam menerapkan model pendekatan DEA, terdapat asumsi-asumsi yang mendasarinya (Ramanathan, 2003 dalam Wulansari 2010) yaitu :

- a. DMU harus merupakan unit-unit yang homogenis, yaitu memiliki fungsi dan tujuan yang sama.
- b. Jumlah ukuran DMU dari unit-unit yang diteliti besarnya 2 atau 3 kali penjumlahan *Input* dan *Output*

Unit Pengambilan Keputusan (DMU)

Decision making unit merupakan satu atau sekumpulan perusahaan atau organisasi yang terlibat dalam membuat dan bertanggung jawab dalam sebuah keputusan penting pada berbagai tujuan dan resiko dalam melakukan kegiatan yang sama. Terutama keputusan tentang melaksanakan sesuatu. Dalam melakukan penelitian, fokus biasanya terletak pada jumlah fase keputusan dan waktu. Namun perlu juga berfokus pada kegiatan rutin seperti memanfaatkan pengambilan keputusan pada organisasi. Dalam melakukan Pemilihan DMU terdapat beberapa kriteria yang harus sama, seperti ukuran perusahaan / organisasi dan keterampilan kepribadian dan anggota staf, jenis produk / jasa yang dibutuhkan, jenis organisasi, tahapan proses kegiatan yang berbeda, durasi hubungan antara organisasi dan kegiatan yang dilakukan. Dalam analisis DEA efisiensi dari DMU ditentukan dengan menggunakan rasio jumlah berat variabel *Output* ke jumlah tertimbang dari variabel *Input*.

Model DEA CCR (Charnes-Cooper-Rhodes)

Pertama kalinya model CCR ditemukan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978. Pada model ini diperkenalkan suatu ukuran efisiensi untuk masing-masing *decision making unit* (DMU) yang merupakan rasio maksimum antara *Output* yang terbobot dengan *Input* yang terbobot. DMU merupakan obyek yang diteliti. Masing-masing nilai bobot yang digunakan dalam rasio tersebut ditentukan dengan batasan bahwa rasio yang sama untuk tiap DMU harus memiliki nilai yang kurang dari atau sama dengan satu. Dengan demikian akan mereduksi *multiple Inputs* dan *multiple Outputs* ke dalam satu "virtual" *Input* dan "virtual" *Output* tanpa membutuhkan penentuan awal nilai bobot. Oleh karena itu ukuran efisiensi merupakan suatu fungsi nilai bobot dari kombinasi *virtual Input* dan *virtual Output*. Ukuran efisiensi DMU dapat dihitung dengan menyelesaikan permasalahan *programming* matematika berikut ini:

$$\max \theta_k = \frac{\sum_{r=1}^t u_r y_{rk}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{ik}}$$

Dimana :

- u_r = bobot dari *Output* ke -r
- v_i = bobot dari *Input* ke-i
- y_{rk} = nilai dari *Output* ke-r pada unit produksi ke -k
- x_{ik} = nilai dari *Input* ke-I pada unit produksi ke-k
- θ_k = nilai efisiensi *Output* dan *Input* dari unit produksi ke-k
- k = objek yang diteliti

➤ Berikut persamaan pada efisiensi (*Input–Output*)

$$\max \theta_k = \frac{\text{jumlah } SDu_1 + \text{jumlah } SMPu_2 + \text{jumlah } SMAu_3 + \text{guru } SDu_4 + \text{guru } SMPu_5 + \text{guru } SMAu_6}{\text{belanja pendidikan } v_1}$$

Metode Potential Improvement

Metode *potential improvement* digunakan untuk membantu DMU dalam meningkatkan efisiensi dengan langkah yang optimal terhadap *frontier* efisiensi. Cara kerja *potential improvement* yaitu dengan menjadikan salah satu DMU sebagai benchmark yang dianggap paling efisien sehingga DMU lainnya yang belum efisien menyesuaikan melalui peningkatan pada *Output* maupun pengurangan pada *Input*.

Rasio Angka Partisipasi Sekolah

angka partisipasi sekolah merupakan sebuah ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka ini memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Cara menghitung angka partisipasi sekolah menurut BPS JATIM adalah :

$$APS_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 1000$$

Dimana :

h = jenjang pendidikan

a = kelompok usia

t = tahun

$E_{h,a}^t$ = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t

$P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah :

SD / MI = 7 -12 tahun

SMP / MTs = 13 – 15 tahun

SMA / MA = 16 – 19 tahun

$$\frac{\text{jumlah murid usia sekolah}}{\text{jumlah penduduk usia sekolah}} \times 1000$$

Untuk APS menurut jenjang pendidikan

$$APS_{7-12} = \frac{\text{jumlah murid usia } 7-12 \text{ thn}}{\text{jumlah penduduk usia } 7-12 \text{ thn}} \times 1000$$

$$APS_{13-15} = \frac{\text{jumlah murid usia } 13-15 \text{ thn}}{\text{jumlah penduduk usia } 13-15 \text{ thn}} \times 1000$$

$$APS\ 16 - 19 = \frac{\text{jumlah murid usia } 16 - 19 \text{ thn}}{\text{jumlah murid usia } 16 - 19 \text{ thn}} \times 1000$$

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan menjadi objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam menganalisis tingkat efisiensi belanja pendidikan pemerintah Kota yang menjadi tempat penelitian ini, peneliti memisahkan variabel menurut jenisnya, yaitu jenis variabel *Input* dan variabel *Output*. Berikut penjelasan menurut jenis dan rincian variabel yang digunakan.

1) Variabel Input:

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan variabel *Input* sebagai objek yang dilihat efisiensinya, yaitu berupa besaran rincian belanja pendidikan di 12 daerah penelitian di Jawa Timur. Peneliti memisahkan variabel *Input* sesuai dengan indikator dari kebutuhan peneliti. Indikator yang digunakan pada variabel *Input* adalah:

a. Belanja Pendidikan (*I*) di 12 daerah yang diteliti di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 dengan ukuran hitung total belanja pendidikan dalam bentuk rupiah. Peneliti memilih belanja pendidikan karena variabel ini merupakan variabel yang berhubungan langsung dengan pendidikan yang ditangani pemerintah daerah.

2) Variabel Output:

Variabel *Output* merupakan variabel yang berfungsi untuk melihat efisiensi dari variabel *Input*. Penentuan variabel *Output* ini memiliki keterkaitan dengan variabel *Input* karena *Output* ini berasal dari *Input* yang tersedia, sehingga dapat melihat keluaran yang diperlukan oleh peneliti. Indikator yang diperlukan peneliti adalah:

a. Jumlah sekolah dasar yang terdaftar (O_1) menjadi alat ukur penggunaan belanja pendidikan dialokasikan untuk penyediaan fasilitas berupa sekolah. Ukuran hitung berupa total sekolah dasar pada tahun 2012.

b. Jumlah sekolah menengah pertama yang terdaftar (O_2) menjadi alat ukur penggunaan belanja pendidikan dialokasikan untuk penyediaan fasilitas berupa sekolah.. Ukuran hitung berupa total sekolah menengah pertama pada tahun 2012.

c. Jumlah sekolah menengah atas yang terdaftar (O_3) menjadi alat ukur penggunaan belanja pendidikan dialokasikan untuk penyediaan fasilitas berupa sekolah.. Ukuran hitung berupa total sekolah menengah atas pada tahun 2012.

d. Jumlah guru pengajar (O_4) menjadi ukuran *Output* di sekolah dasar di tiap Kota dan Kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan ukuran hitung berupa jumlah total pengajar di setiap daerah pada tahun 2012.

e. Jumlah guru pengajar (O_5) menjadi ukuran *Output* di sekolah menengah pertama di tiap Kota dan Kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan ukuran hitung berupa jumlah total pengajar di setiap daerah pada tahun 2012.

f. Jumlah guru pengajar (O_6) menjadi ukuran *Output* di sekolah menengah atas di tiap Kota dan Kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan ukuran hitung berupa jumlah total pengajar di setiap daerah pada tahun 2012.

3). Variabel Outcomes:

Variabel *Outcomes* merupakan variabel yang berfungsi untuk melihat efisiensi dari variabel *Output*. Penentuan variabel *Outcomes* ini memiliki keterkaitan dengan variabel *Output* sehingga dapat melihat hasil yang diperlukan oleh peneliti. Indikator yang diperlukan peneliti adalah:

a. Angka Partisipasi SD menjadi ukuran *Outcomes* pada penelitian belanja pendidikan di tiap daerah di Jawa Timur dengan ukuran hitung berupa jumlah total murid di tingkat dasar pada tahun 2012/2013 dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

b. Angka Partisipasi SMP menjadi ukuran *Outcomes* pada penelitian belanja pendidikan di tiap daerah di Jawa Timur dengan ukuran hitung berupa jumlah total murid di tingkat menengah pertama pada tahun 2012/2013 dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

c. Angka Partisipasi SMA menjadi ukuran *Outcomes* pada penelitian belanja pendidikan di tiap daerah di Jawa Timur dengan ukuran hitung berupa jumlah total murid di tingkat menengah atas pada tahun 2012/2013 dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16–19 tahun.

Tabel 1: **Variabel Dan Sumber Data Variabel Penelitian**

Definisi Operasional Variabel			
No	kategori	Variabel	Sumber Data
1	Efisiensi	Total Belanja Pendidikan	Laporan APBD Per Kabupaten / Kota Dari DJPK
2		Jumlah Sekolah SD	BPS Jawa Timur
3		Jumlah Sekolah SMP	BPS Jawa Timur
4		Jumlah Sekolah SMA	BPS Jawa Timur
5		Guru SD	BPS Jawa Timur
6		Guru SMP	BPS Jawa Timur
7		Guru SMA	BPS Jawa Timur
8	Efektivitas	angka partisipasi SD	BPS Jawa Timur
9		angka partisipasi SMP	BPS Jawa Timur
10		angka partisipasi SMA	BPS Jawa Timur

Sumber : ilustrasi peneliti

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisa dengan menggunakan metode “*Data Envelopment Analysis*”. data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi permasalahan yang dihadapi. Analisis data envelopment digunakan untuk menghitung efisiensi penggunaan belanja pendidikan terhadap setiap sektor *Output* yang dihasilkan. Serta membandingkan hasil dari DEA dengan melihat rasio APS untuk melihat Efektivitas.

Peneliti juga menggunakan metode komparatif. Hal ini dilakukan untuk membandingkan teori yang ada dengan praktik yang ditemui di lapangan kemudian dapat menarik kesimpulan. Langkah akhir yang digunakan dalam menganalisis data dengan memberi saran dari hasil perbandingan yang telah dilakukan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan saat ini menjelaskan secara lebih menyeluruh. Daerah yang memiliki nilai efisien dari perhitungan efisiensi *Input* dengan *Output* mendapatkan hasil 5 daerah yang efisien kemudian pada tolak ukur efektivitas dilihat dari angka partisipasi sekolah yang mendapatkan hasil diatas 950 hingga 1000 maka pemerintah dapat dikatakan efektif dalam menjalankan kebijakan pendidikan dan hanya terdapat 6 daerah yang memperoleh hasil efektif

hanya sampai tingkat SMP. Pada tingkat SMA, di daerah penelitian maupun di seluruh daerah di Jawa Timur tidak ada yang mendapatkan hasil efektif. Capaian tertinggi APS tingkat menengah atas hanya 714 dengan letak daerah berada di Kota Pasuruan. Dalam analisis efisiensi menggunakan pendekatan DEA dan melihat APS didapatkan efisiensi *Input*, *Output* dan *Outcomes* dengan hasil paling efisien hanya 3 daerah dari ke 12 daerah yang diteliti.

Hasil pada perhitungan *Data Envelopment Analysis* ini dari 12 daerah menunjukkan bahwa yang memiliki nilai efisiensinya 100 tidak mencapai setengahnya atau masih banyaknya pemerintah daerah yang melakukan belanja pendidikan dengan tidak efisien. Daerah yang mendapatkan hasil efisien dengan perhitungan DEA yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2007) mengenai efisiensi yang dilakukan pemerintah terhadap belanja pendidikan dan kesehatan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah cenderung belum efisien dalam mengeluarkan belanja pemerintah di masing-masing daerah dan hanya satu yang mendapatkan nilai efisien. Namun pada analisis belanja pendidikan di Jawa Timur ini sedikit lebih banyak meskipun tidak mencapai setengahnya.

Berbeda dengan hasil yang ditunjukkan efektivitas di 12 Kota/Kabupaten. Pada tingkat SD dan SMP mendapatkan nilai hampir mendekati 1000 yang menandakan bahwa daya serap pendidikan pada tingkat ini sangat bagus atau dengan indikator diatas 950. Nilai tertinggi untuk angka partisipasi sekolah di tingkat dasar berada pada Kota Madiun sebesar 999. Meskipun Kota Madiun pada efisiensi belanja pendidikan mendapatkan hasil yang paling buruk dalam pengelolaan efisiensi namun Kota ini mampu menggalakkan penduduk usia 7 – 12 tahun untuk dapat mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah di tingkat menengah pertama yang mendapatkan nilai tertinggi mencapai 968 yaitu berada pada Kota Blitar yang juga memiliki nilai efisiensi rendah atau hanya 58. Kemudian pada angka partisipasi sekolah di tingkat menengah atas yang mendapatkan nilai tertinggi berada pada Kota Pasuruan. Angka partisipasi sekolah menengah atas ini hanya mendapatkan nilai 714. Nilai tertinggi yang didapatkan Kota Pasuruan belum dapat dikatakan efektif karena jauh dari indikator dinas pendidikan yang menetapkan nilai diatas 950. Di semua daerah pada penyerapan penduduk yang bersekolah usia 16–19 tahun tidak sebanyak tingkat SD dan SMP. Hal ini karena masih mahal biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat. Daerah yang mampu mendapatkan hasil efektif yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Batu, dan Kota Mojokerto.

Tabel 2: Hasil Efisiensi dan Efektivitas 12 Daerah Penelitian

no	DMU	Input	Output									HASIL	
			negeri dan swasta										
			©	(d)	€	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)		
kabupaten / kota	total belanja pendidikan	jumlah sekolah SD	jumlah sekolah SMP	jumlah sekolah SMA	guru SD	guru SMP	guru SMA	angka partisipasi SD	angka partisipasi SMP	angka partisipasi SMA	efisiensi	efektivitas	
1	Kota Surabaya	Rp1.470.439	807	306	134	14183	10363	3340	989	954	629	efisien	efektif
2	Kab. Jember	Rp1.050.270	1019	271	62	12336	6902	1755	987	837	449	efisien	tidak efektif
3	Kab. Banyuwangi	Rp816.842	814	159	48	7972	3184	1313	991	932	515	efisien	tidak efektif
4	Kab. Sidoarjo	Rp787.519	554	149	58	8215	4601	1805	992	963	687	efisien	efektif
5	Kab. Blitar	Rp771.255	716	97	35	7684	2573	657	985	933	554	tidak efisien	tidak efektif
6	Kab. Kediri	Rp755.409	655	95	27	7572	2821	993	990	917	547	tidak efisien	tidak efektif
7	Kota Madiun	Rp254.106	71	21	13	1011	748	483	999	956	700	tidak efisien	efektif
8	Kota Probolinggo	Rp197.115	119	22	11	1216	569	319	983	938	646	tidak efisien	tidak efektif
9	Kota Blitar	Rp181.988	65	20	8	815	623	291	992	968	677	tidak efisien	efektif
10	Kota Pasuruan	Rp151.003	62	23	9	1048	637	300	994	942	714	tidak efisien	tidak efektif
11	Kota Batu	Rp149.539	73	26	9	995	636	290	987	958	611	tidak efisien	efektif
12	Kota Mojokerto	Rp121.970	59	17	11	698	596	447	993	957	691	efisien	efektif

Sumber: hasil olahan, 2014

Pada belanja pendidikan yang memiliki hasil paling efisien dan efektif diantara daerah penelitian yaitu Kota Mojokerto. Kota Mojokerto menjadi *benchmark* dalam analisis ini padahal jika dilihat dari nominal belanja pendidikan Kota Mojokerto termasuk paling sedikit dibanding 37 Kabupaten/Kota lainnya. Selain itu Kota Mojokerto juga mengalokasikan belanja pendidikan paling rendah atau hanya 20 dari persentase total belanja. Daerah ini menjadi daerah dengan luas terkecil di Jawa Timur namun daerah ini mampu mengeluarkan belanja pendidikan (*Input*) dengan sangat efisien sehingga mendapatkan hasil *Output* yang maksimal. Hasil efektif dengan nilai APS tertinggi juga didapatkan daerah ini. Kota Mojokerto memperoleh nilai APS tingkat dasar hingga menengah atas dengan hasil tertinggi yaitu masing-masing 993, 957, dan 691. Hasil ini tertinggi dibandingkan dari 2 daerah yang mendapatkan hasil efisien (Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo). Kota Mojokerto menjadi daerah yang paling efisien dan efektif ini didukung juga dengan fokus pembangunan yang terletak pada SDM. Kota Mojokerto menjadi daerah terkecil di Indonesia sehingga SDA yang dimiliki tidak banyak maka dari itu pemerintah daerah lebih meningkatkan di bidang kesehatan dan pendidikan. (Mojokertokota, 2014) di bidang pendidikan pada tahun 2007 pemerintah kota Mojokerto sudah menetapkan wajib belajar 12 tahun, dan pada tahun 2009 telah mencanangkan program kota Mojokerto berlingkungan pendidikan. Ini menyangkut juga dengan efektivitas yaitu angka partisipasi sekolah yang sudah diperhatikan pemerintah kota Mojokerto. Anggaran khusus untuk pendidikan bagi daerah ini sudah cukup dan pemerintah kota juga mewajibkan bagi anak usia sekolah agar menjalankan pendidikan hingga tamat SMA.

Daerah yang mendapatkan hasil efisien dan efektif kedua didapatkan oleh Kabupaten Sidoarjo. Daerah yang memiliki nominal belanja pendidikan 5x lebih besar dari Kota Mojokerto. Kabupaten Sidoarjo mendapatkan hasil efisien karena daerah ini mampu mengeluarkan belanja pendidikan dengan sangat efisien. Kemudian pada hasil Angka Partisipasi Sekolah juga mendapatkan hasil mendekati angka 1000. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membelanjakan belanja pendidikan sudah dirasakan oleh masyarakat dilihat dari *Outcomes* daerah ini tinggi yaitu ; APS di tingkat dasar sebesar 992, APS ditingkat SMP sebesar 963 dan APS di tingkat SMA sebesar 687.

Hasil efisiensi dan efektivitas ketiga diperoleh Kota Surabaya. Daerah ini menjadi *benchmark* bagi 6 Kota lainnya dalam menentukan efisiensi menggunakan analisis DEA. Kota Surabaya yang memiliki belanja pendidikan paling tinggi dari seluruh daerah di Jawa Timur juga mampu mengalokasikan belanja pendidikan dengan sangat efisien. Terlihat pada perhitungan menggunakan *Data Envelopment Analysis* mendapatkan hasil 100. Selain itu pada angka partisipasi sekolah mendapatkan hasil sedikit dibawah Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Nilai APS tingkat dasar sebesar 989, nilai APS menengah pertama sebesar 954, dan APS menengah atas sebesar 629. Meskipun Kota Surabaya menggratiskan biaya pendidikan hingga SMA dari tahun 2011 namun masih ditunjukkan banyaknya siswa yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA.

Daerah yang memiliki hasil efisien dalam belanja pendidikan pada perhitungan DEA namun tidak efektif dalam hasil Angka partisipasi sekolah terdapat 2 Kota yaitu Banyuwangi dan Jember. Kedua daerah ini memiliki nilai APS tingkat SD yang mendekati angka 1000, namun pada tingkat SMP dan SMA masih jauh dari angka 1000. Hal ini menandakan bahwa penduduk usia 13-19 tahun masih banyak yang tidak bersekolah atau dengan kata lain penyerapan anak usia ini masih dikatakan kurang. Padahal seharusnya sudah ada peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 81 tahun 2008 tentang uraian tugas sekretariat, bidang, sub bagian dan seksi dinas pendidikan provinsi Jawa Timur pada bab 2 pasal 8 nomor 1 menyebutkan bahwa “bidang sekolah menengah pertama dan bidang sekolah atas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta peningkatan efisiensi dan Efektivitas pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah atas (SMA). Hal ini mengartikan bahwa seharusnya pemerataan sudah dapat dilakukan karena jarak waktu peraturan gubernur ini dengan penelitian ini sejauh empat tahun. Seharusnya sudah dapat terlaksana peraturan yang ada ini.

Pembahasan pertama daerah yang tidak efisien yaitu Kabupaten Banyuwangi. Daerah ini mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 32 sehingga dalam perhitungan dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis* menghasilkan angka 100 yang mengartikan Banyuwangi efisien dalam

mengolah *Input* dan keluaran (*Output*). Selain itu daerah ini juga menjadi *benchmark* bagi 4 daerah lainnya yang menandakan bahwa efisiensi yang dilakukan cukup baik. Namun hasil APS tidak sesuai dengan efisiensi yang didapatkan dengan perhitungan DEA. Angka partisipasi sekolah di tingkat dasar mencapai hasil 991 atau dapat dikatakan penyerapan pada usia 7–12 tahun sudah sangat baik. Tetapi pada APS tingkat SMP mengalami hasil tidak efektif atau hanya 932. Selain itu pada angka partisipasi sekolah menengah atas juga jauh dari hasil efektif.

Kedua, terletak pada Kabupaten Jember. Daerah ini juga mendapatkan hasil efisien pada perhitungan *Data Envelopment Analysis*. Daerah ini memiliki belanja pendidikan tertinggi kedua di Jawa Timur sehingga dalam perhitungan DEA mendapatkan hasil efisien. Namun pada angka partisipasi sekolah mendapatkan hasil yang rendah. Pada tingkat SMP angka partisipasi sekolahnya hanya mencapai 837 dan pada SMA angka partisipasi sekolah yang didapatkan hanya 449. Penyerapan siswa umur 13–19 tahun masih sangat kurang.

Daerah yang memiliki angka partisipasi sekolah terbaik tetapi tidak termasuk daerah yang efisien dalam perhitungan belanja pendidikan adalah Kota Madiun, Kota Blitar, dan Kota Batu. Beberapa daerah ini termasuk dalam APS tertinggi dibandingkan daerah lainnya ditingkat SD dan SMP. Namun prestasi ini tidak diimbangi dengan pengelolaan belanja pendidikan dengan baik. Hasil yang didapatkan dari perhitungan DEA sangat jauh dari kata efisien atau dapat dikatakan inefisien. Pada hasil perhitungan efisiensi menggunakan *Data Envelopment Analysis* ditunjukkan bahwa ketiga daerah ini mengalami pemborosan hingga harus dikurangi 42 dari belanja pendidikan semula. Selain itu penambahan jumlah sekolah lebih banyak dari pada menambah jumlah guru. Namun ketiga daerah ini memiliki APS yang bagus. Pemborosan ini tidak dapat diketahui dengan pasti karena pembagian alokasi belanja yang digunakan untuk murni urusan pendidikan dengan gaji yang diberikan kepada guru tidak dapat dilihat namun hasil ini mengalami kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sunandar dalam penelitiannya yang berjudul “Efisienkah Belanja Pendidikan Kabupaten?”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir belanja pendidikan termasuk gaji telah melebihi 20 dari APBD. Sebesar 95% belanja pendidikan untuk belanja tidak langsung berupa gaji. *Input* pendidikan dasar dilihat dari jumlah sekolah dan ruang kelas terdapat kelebihan. Tetapi dilihat dari jumlah ruang kelas yang layak pakai dan jumlah WC masih ada kekurangan. *Input* tenaga kependidikan baik guru kelas dan guru mata pelajaran juga mengalami kelebihan, namun beban mengajar dan kualifikasi akademik pendidik masih banyak yang belum memenuhi standar. *Output* pendidikan dasar sudah baik dilihat dari angka tinggal kelas, angka putus sekolah, dan angka ketidakhadiran. *Outcome* pendidikan dasar juga sudah baik dilihat dari APK, APM, dan Nilai UN yang ketiganya menunjukkan kecenderungan meningkat.

Kota Madiun menjadi daerah yang memiliki nilai efisiensi terendah dalam perhitungan DEA. Hanya 57,8% hasil efisiensi yang didapatkan Kota ini. Belanja pendidikan Kota ini boros hingga 42%. Serta perlu dilakukan penambahan pada jumlah SD dan SMP sebesar 7 dan 9. Namun hasil APS tingkat SD mendapatkan angka tertinggi yaitu 999 yang menandakan hampir semua anak usia 7-12 tahun mendapatkan pendidikan dengan baik. Begitu juga dengan APS tingkat SMP mendapatkan hasil 956. Hal ini dapat diketahui bahwa orang tua berpikiran sangat pentingnya pendidikan bagi anak – anak mereka. Kota Madiun mampu dalam penyerapan pendidikan namun sangat boros dalam pemakaian belanja pendidikan.

Daerah yang mendapatkan hasil inefisien selanjutnya adalah Kota Blitar. Daerah yang termasuk dalam belanja pendidikan terendah ini masih menggunakan belanja pendidikan dengan boros. Pemborosan ini dapat dilihat pada belanja pendidikan yang kelebihan sehingga perlu dilakukan pengurangan sebesar 42%. Selain itu perlu dilakukan penambahan pada jumlah sekolah SD dan SMA sebesar 2 dan 7. Pada jumlah guru SD juga dilakukan hal yang sama yaitu 8. Hasil efisiensi dengan menggunakan DEA menunjukkan angka 58%. Namun pada hasil APS SMP mendapatkan hasil tertinggi dibandingkan daerah lainnya yaitu mencapai 968. Hasil efektif juga didapatkan di tingkat dasar yaitu sebesar 992.

Daerah yang memiliki hasil efektif hingga SMP selanjutnya namun tidak efisien dalam melakukan belanja pendidikan adalah Kota Batu. Daerah ini termasuk daerah dengan belanja pendidikan terendah kedua setelah Kota Mojokerto. Alokasi yang diberikan untuk belanja pendidikan sekitar 24% dari total belanja. Daerah ini termasuk perkotaan metropolitan menurut rencana tata ruang wilayah. Sehingga pada Angka Partisipasi Sekolah mencapai hasil mendekati

angka 1000 untuk tingkat dasar dan menengah pertama. Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah Batu mampu melakukan penyerapan terhadap penduduk usia 7–12 tahun untuk bersekolah. Namun daerah ini belum dapat melakukan belanja pendidikan dengan efisien. Hasil efisien pada perhitungan DEA yaitu sebesar 81,5. Jika Kota Batu mendapatkan hasil efisien maka yang harus dilakukan daerah ini adalah dengan mengurangi belanja pendidikan sebesar 18 atau menjadi Rp 121.812,30. Kemudian perlu dilakukan penambahan pada jumlah SD sebesar 25 dan jumlah guru SD sebesar 16 atau 1.163,83 (1.163 guru). Dan guru SMP sebesar 17 atau 747,28 (747 guru).

Selanjutnya adalah daerah yang tidak mendapatkan hasil efisien pada perhitungan *Data Envelopment Analysis* juga tidak dapat dikatakan efektif karena hasil pada angka partisipasi sekolah sangat jauh dari angka 1000. Daerah yang tidak efisien ini adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan. Ke empat daerah ini hanya mampu melakukan penyerapan sekolah hanya sampai pada usia 7–12 tahun atau setara sekolah dasar saja. Sehingga perlu dilakukan penambahan yang cukup banyak khususnya di tingkat SMP dan SMA dalam hal jumlah sekolah maupun guru pengajarnya. Hal ini mengalami kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nina Toyamah dan Syaikhu Usman dengan judul penelitiannya yaitu “ alokasi anggaran pendidikan di era otonomi daerah: implikasinya terhadap pengelolaan pelayanan pendidikan dasar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan pendidikan dasar di era otonomi daerah belum menunjukkan perubahan yang berarti, bahkan cenderung menurun. Persoalan di bidang pendidikan sejak sebelum pelaksanaan otonomi daerah hingga kini belum bergeser, yaitu sekitar permasalahan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta rendahnya kualitas dan terbatasnya tenaga pengelola dan pelaksanaan dengan ketersebaran yang tidak merata.

Pembahasan pertama untuk daerah yang tidak efisien di dalam perhitungan DEA maupun nilai yang sedikit pada APS terletak pada Kabupaten Blitar. Daerah ini berbeda dengan Kota Blitar yang telah dibahas sebelumnya. Sehingga hasil yang diperoleh daerah ini juga berbeda dengan Kota Blitar. Dalam perhitungan *Data Envelopment Analysis* menunjukkan hasil tidak efisien. Namun ketidakefisienan ini masih berada pada warna kuning yang menandakan tidak terlalu boros meskipun masih belum dapat dikatakan efisien. Angka yang diperoleh pada perhitungan DEA adalah 94 yakni mendekati nilai efisien. Begitu juga dengan angka partisipasi sekolah untuk tingkat menengah pertama masih jauh dari angka 1000 atau mendapat hasil 933. Kabupaten Blitar perlu melakukan *Potential Improvement* agar mencapai hasil efisien pada *Input* dan *Output*. Pengurangan dilakukan pada belanja pendidikan sebesar 5 atau menjadi Rp 726.400,40. Kemudian penambahan yang besar juga dilakukan pada jumlah sekolah dan guru juga diperlukan untuk dapat melakukan penyerapan penduduk usia sekolah. Penambahan ini dilakukan pada jumlah SMP sebanyak 160,37 (160 sekolah) dan SMA sebanyak 42,77 (42 sekolah). Kemudian pada guru SMP dilakukan penambahan sebesar 41 atau 3.632,05 (3.632 guru) dan pada SMA perlu dilakukan penambahan sebanyak 80,62 atau 1.186,66 (1.186 guru). Penambahan yang sangat besar ini dilakukan agar dapat menyerap penduduk usia sekolah lebih banyak.

Selanjutnya membahas Kabupaten Kediri. Hasil pada perhitungan DEA menunjukkan hasil 88 atau dikatakan tidak efisien dalam melakukan belanja pendidikan dilihat dari segi *Input* dan *Output*. Kabupaten Kediri merupakan daerah yang memiliki nominal belanja pendidikan terbesar ke-6 di seluruh Jawa Timur. Namun daerah ini belum dapat melakukan belanja pendidikan dengan efisien. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada APS yang rendah. Sehingga dapat dikatakan penyerapan pada anak usia sekolah belum terlaksana secara maksimal. Daerah ini mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 33 dari total belanja. Namun masih boros dalam menggunakan belanja pendidikan. Jika daerah ini ingin dapat efisien serta dapat menyerap anak usia sekolah maka yang harus dilakukan daerah ini adalah dengan mengurangi belanja pendidikan sebesar 11 atau menjadi Rp 670.896,46. Penambahan pada jumlah SMP dan SMA dari hal sekolah maupun guru juga perlu dilakukan untuk menyerap anak usia sekolah hingga SMA. Besaran penambahan untuk jumlah sekolah SMP sebanyak 71,87 atau 163,28 (163 sekolah) dan guru SMP sebanyak 41,59 atau 3.994,18 (3.994 guru). Pada tingkat SMA juga dilakukan penambahan sebanyak 46,53 atau 39,56 (39 sekolah) dan untuk guru dilakukan penambahan sebesar 11,90 atau 1.111,20 (1.111 guru).

Daerah yang tidak efisien berikutnya adalah Kota Probolinggo. Kota ini memberikan 25 dari total belanja untuk belanja pendidikan. Pengalokasian ini berada di atas peraturan dari pemerintah pusat yang menganjurkan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja

pendidikan minimal 20. Efisiensi dari perhitungan DEA menunjukkan hasil inefisien karena hanya mendapatkan hasil 76,5. Pada angka partisipasi sekolah yang mendekati angka 1000 hanya pada APS tingkat SD. Nilai ini pun terkecil dibanding daerah lain yaitu hanya 980 untuk APS SD. APS SMP dan SMA masih berada dibawah angka 950 sehingga perlu dilakukan penambahan pada *Output* agar dapat menyerap usia sekolah lebih banyak. Penambahan yang diperlukan berdasarkan pendekatan *Data Envelopment Analysis* adalah jumlah SMP dengan persentase tambahan sebesar 30 dan pada guru sebesar 31. Kemudian pada tingkat dasar perlu dilakukan penambahan sebesar 12 untuk guru. Pengurangan pada belanja pendidikan juga dilakukan karena masih dianggap terlalu boros dalam mengalokasikannya. Pengurangan ini sebesar 23 atau menjadi Rp 150.863,44.

Pembahasan Kota inefisien terakhir berada pada Kota Pasuruan. Kota ini mendapatkan hasil 77 dari perhitungan DEA. Kemudian pada penyerapan penduduk usia sekolah juga mendapatkan hasil yang kurang dalam daya serap. Ketidak efisienan belanja pendidikan ini menyebabkan pemborosan yang selanjutnya mengganggu penyerapan penduduk usia sekolah di Kota ini. Angka partisipasi sekolah tingkat dasar mencapai 994, hal ini menandakan penyerapan anak usia 7–12 tahun masih sangat baik. Pada APS tingkat SMP mendapatkan hasil 942, hal ini menandakan penyerapan untuk usia 13 -15 tahun masih kurang karena masih jauh dari angka 1000. Begitu juga dengan APS SMA yang hanya mencapai 714, meskipun hasil APS ini jauh dari penyerapan usia sekolah 16 – 19 tahun namun hasil ini merupakan hasil tertinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Pemborosan belanja pendidikan yang dilakukan Kota Pasuruan terletak pada terlalu banyaknya belanja pendidikan sehingga perlu dilakukan pengurangan sebesar 23 atau menjadi Rp 116.229,14. Selain itu penambahan pada *Output* juga perlu dilakukan untuk menambah penyerapan anak usia sekolah. Penambahan ini dilakukan pada jumlah SD sebesar 29 atau menjadi 80,32 (80 sekolah) kemudian pada guru SMP menjadi 689,77 (689 guru) atau penambahan sebanyak 8,28. Hal ini karena kota Pasuruan memiliki strategi pembangunan yang belum mendukung pendidikan secara maksimal. Seperti terlihat pada 3 strategi yang di publikasikan untuk tahun 2010-2015 (Pasuruankota, 2013) pertama, pemberdayaan masyarakat (*empowering*) melalui penyusunan kebijakan yang mengarah pada perluasan lapangan kerja (*pro job*). Kedua, keberpihakan pada masyarakat miskin (*pro poor*) dan ketiga, pemerataan pertumbuhan ekonomi (*growth with equity*). Kota Pasuruan tidak melakukan investasi jangka panjang seperti pendidikan namun kepada investasi jangka pendek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara cepat hal ini didukung juga dengan wilayah yang terkonsentrasi pada industrialisasi.

Hal ini menunjukkan masih banyaknya daerah yang tidak efisien dalam pengelolaan belanja pendidikan di tahun 2012. Banyaknya faktor–faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ketidak efisienan sehingga membuat dunia pendidikan mengalami kemunduran, ketidak merataan yang semakin lebar hingga membuat anak yang memiliki hak untuk mengenyam pendidikan menjadi tidak tercapai karena ketidak mampuan. Masih banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat setempat sehingga mengakibatkan pemborosan belanja keuangan yang akhirnya membuat tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam hal pendidikan. Penelitian yang sama dilakukan oleh Nurkolis dalam penelitiannya yang berjudul “Belanja Pendidikan Tersedot Untuk Gaji Pegawai” dengan tempat penelitian berada di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Temuan dari penulis ini bahwa belanja keseluruhan melebihi 20 dari belanja APBD namun jika tidak termasuk gaji maka hasilnya hanya dibawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan guru mungkin dapat dicapai namun tujuan dari pengeluaran pendidikan belum tercapai karena kecilnya alokasi yang diberikan untuk masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Apabila anggaran pendidikan tidak termasuk belanja gaji pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Wonosobo hanya berkisar antara 3-9, sedangkan di Kabupaten Purworejo berkisar antara 5-9. Selama empat tahun terakhir di dua Kabupaten tersebut anggaran pendidikan jika tidak memasukkan belanja gaji pendidik dan tenaga kependidikan mengalami kecenderungan menurun. Sebaliknya jika belanja pendidikan termasuk belanja gaji pendidik dan tenaga kependidikan selama empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja pendidikan di Jawa Timur dengan melibatkan 12 daerah penelitian. Menunjukkan bahwa hanya 3 daerah yang memperoleh hasil efisien dan efektif dalam melakukan belanja pendidikan. Hasil ini muncul setelah menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk menganalisis efisiensi dan melihat angka partisipasi sekolah (APS) untuk menganalisis efektivitas. Daerah yang mendapatkan hasil ini adalah kota Mojokerto, kabupaten Sidoarjo, dan kota Surabaya. Sedangkan daerah lainnya cenderung tidak efisien dan tidak efektif. Kecenderungan pada daerah yang melakukan belanja pendidikan dengan tidak efisien adalah pada daerah yang memiliki nominal belanja pendidikan rendah. Hal ini dikarenakan masih tidak mampunya pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja pendidikan. Namun rata-rata penyerapan pada anak usia sekolah mendapatkan hasil lebih tinggi dibandingkan daerah yang memiliki nominal belanja pendidikan tinggi. Selain itu kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja pendidikan dengan efisien dan efektif seharusnya dapat dilakukan oleh semua daerah. Seperti halnya kota Mojokerto yang menjadi kota terendah dalam belanja pendidikan tetapi daerah ini mampu menjadi *benchmark* bagi daerah lainnya. Kebanyakan pemerintah daerah dalam Penggunaan belanja pendidikan yang tidak efisien ini terjadi pemborosan pada penggunaan belanja pendidikan namun penyediaan *Output* masih sangat kurang.

Belanja pendidikan di 6 kabupaten/kota tertinggi cenderung efisien. Hal ini karena daerah ini dapat melakukan efisiensi belanja pendidikan dengan sangat baik. Seperti halnya di Surabaya dengan biaya pendidikan digratiskan hingga SMA keadaan ini menandakan bahwa pemerintah Surabaya bersungguh-sungguh dalam meningkatkan pendidikan meskipun efektivitas pendidikan yang didapatkan di tingkat SMA juga mendapatkan hasil yang masih sama dengan daerah lainnya. Namun daerah yang memiliki nominal belanja pendidikan tertinggi lainnya dalam hasil APS menunjukkan masih rendahnya penyerapan anak usia sekolah. Hal ini bias dikarenakan jumlah penduduk pada usia sekolah lebih besar sehingga penyerapan penduduk usia sekolah juga semakin sulit. Daerah yang memiliki belanja pendidikan tertinggi ke-2 yaitu kabupaten Jember, namun pada angka partisipasi sekolah di tingkat menengah pertama dan menengah atas menjadi nilai terendah yaitu masing-masing 837 dan 449. Hal ini menandakan bahwa ke-efisienan pemerintah kabupaten Jember belum mampu mencapai efektivitas yang diharapkan.

Saran

Pemerintah daerah di Jawa Timur dalam melakukan pengeluaran khususnya belanja pendidikan perlu melakukan sesuai kebutuhan dan dapat memberikan hasil yang nyata kepada masyarakat. Penyajian penelitian belanja yang dilakukan pemerintah ini khususnya belanja pendidikan menggunakan metode perhitungan *Data Envelopment Analysis* sebagai alat dalam memperhitungkan tingkat efisiensi. Namun, pemerintah tidak bisa langsung menggunakan hasil ini sebagai acuan dalam mengalokasikan belanja pendidikan. Sangat perlu bagi pemerintah dalam melihat permasalahan di masyarakat khususnya mengenai tingkat pendidikan yang rendah maupun biaya pendidikan yang mahal. Setiap daerah memiliki permasalahan yang tidak sama sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara kompleks. Penelitian ini memberikan solusi dilihat dari segi *Input*, *Output* serta *outcomes* dilihat dari Belanja pendidikan yang masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan *Output* yang ada saat ini seperti ketersediaan sekolah maupun pengajar. Hal ini terkesan membuat belanja pendidikan yang ditargetkan pemerintah daerah menjadi boros. Pemborosan ini bagi daerah yang belum efisien dapat dialihkan untuk membiayai anak yang tidak mampu sehingga pendidikan dengan biaya mahal dapat ditekan atau dihilangkan. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah hingga jenjang SMA.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2012. *Hasil Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas Provinsi Jawa Timur Tahun 2012)*. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- Case, Karl E dan Fair, Ray C. 2006. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Jilid Satu. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.

- Cooper, WW. Seiford, LM. Dan Tone, K. 2000. *DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA – Solver Software*. London: Kluwer Academic Publishers
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *Data APBD TA 2012* *)<http://www.djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006> diakses pada 28 november 2013
- Fattah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadinata, I. dan Manurung, Adler H. 2008. *Penerapan Data Envelopment Analysis (Dea) Untuk Mengukur Efisiensi Kinerja Reksa Dana Saham*. Vol 12, no 1. Jurnal Akuntansi.
- Indonesia Higher Education Network DIKTI. (____). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.<http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf> diakses pada 29 november 2013
- Laily, N. dan Ec. Budiono P. 2013. *Teori Ekonomi*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Lestari, Triyanti. 2013. *Analisis Efisiensi Belanja Daerah di Jawa Timur (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2009 – 2011)*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya
- Mihaiu, Diana M. Oprena, Alin dan Cristescu, Marian P. 2010. *Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector*. Romanian Journal of Economic Forecasting – 4/2010.http://www.ipe.ro/rjef/rjef4_10/rjef4_10_10.pdf diakses pada 08 Oktober 2013
- Mojokertokota. 2014. 19 Februari. *Pemkot Mojokerto Masuk 10 Besar Common Sense*.<http://mojokertokota.go.id/media.php/berita/details/nw2014021909151725>. Diakses pada 19 Maret 2014
- Nurkolis. 2012. *Belanja Pendidikan Tersedot untuk Gaji Pegawai*. Vol 1, no 1. Semarang: Program Pascasarjana MP IKP PGRI.
- Pasuruankota. 2013. 19 Maret. *Walikota Tegaskan Strategi Pembangunan Kota Pasuruan*.<http://www.pasuruankota.go.id/v2/?p=3145>. Diakses pada 19 maret 2014
- Pertiwi, Lela Dina. 2007. *Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 12 No 2.<http://journal.uui.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/511/423> diakses pada 1 oktober 2013
- Prasetya, Ferry. 2012. Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah
- Prawoto, Agus. 2011. *Pengantar keuangan publik* (edisi pertama). Yogyakarta: BPFE – YOGYAKARTA
- Sunandar dan Nurkolis. 2012. *Efisienkah Belanja Pendidikan Kabupaten?*. Vol 1, no 1. Semarang: Program Pascasarjana MP IKP PGRI.
- Toyamah, N. dan Usman, S. 2004. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. Jakarta : Lembaga Penelitian SMERU.
- World Bank Indonesia. 2013 *Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Kinerja Pendidikan: Survei Kualitas Tata Kelola Pendidikan pada 50 Pemerintah Daerah di Indonesia*.<http://www-wds.worldbank.org/external/> diakses pada 8 Desember 2013
- Wulansari, RR Retno. 2010. *Efisiensi Relatif Operasional Puskesmas-Puskesmas Di Kota Semarang Tahun 2009*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.